

ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA SE-SUMATERA BARAT

ARTIKEL

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

YURISDICTIE C. KHARISMA

14043087/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
ANALISIS KUALITAS *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA
SE-SUMATERA BARAT

Oleh:
YURISDICTIE C. KHARISMA
14043087

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2018 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 3 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Pembimbing II



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP. 19840113 200912 2 005

ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KOTA SE-SUMATERA BARAT

Yurisdiction C. Kharisma

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: urikharisma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas *website* Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Sumatera Barat dengan penilaian transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif. Dokumentasi dan kepustakaan digunakan untuk proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis skoring. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kualitas *website* sesuai dengan prinsip *good governance* pada Kota di Sumatera Barat masih rendah (2) Faktor penyebab rendahnya kualitas *website* yaitu kurangnya formasi tenaga ahli bidang teknik informatika, sehingga *website* tidak dikelola dengan baik, penyediaan informasi yang minim, tidak adanya standarisasi infrastruktur, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan pelatihan kepada staff khusus bidang informatika, memberikan evaluasi rutin dalam pengembangan *website*, dan menerapkan sanksi terhadap *website* yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kata kunci: E-government, good governance, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi.

ABSTRACT

This study aims to determine how the quality of local government websites in the cities of West Sumatra Province assessing its transparency, accountability, effectivity, and efficiency. This research used quantitative-descriptive method. Documentation and bibliography are used for the data collection process using scoring analysis techniques. The results showed: (1) The quality of the website in accordance with the principles of good governance in the City in West Sumatra is still low (2) The factor causing the low quality of the website is the lack web development experts, as such the website is not well managed, the provision of minimal information, absence of standardization of infrastructure, and lack of government oversight. (3) Efforts to overcome these barriers are conducting training for staffs, providing routine evaluations in website development, and imposing sanctions on websites that do not conform with standards.

Keywords: E-government, good governance, tranparation, accountability, effectivity, efficiency

PENDAHULUAN

Presiden RI, Joko Widodo, mendorong terealisasinya pemerintahan berbasis elektronik atau diistilahkan "e-government". Hal ini untuk menjamin transparansi dan efisiensi, sehingga tercipta pemerintahan yang bebas korupsi dan pelayanan publik yang lebih memadai karena kemudahan akses komunikasi. (<http://tekno.kompas.com>, 2018). Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pengimplikasian e-government yaitu, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan publik dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu lama hanya untuk menyelesaikan sebuah perizinan seperti saat ini. E-government bertujuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat pada orang-orang yang menggunakan layanan-layanan tersebut, yaitu masyarakat. Dengan adanya online system, masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk melakukan aktivitas yang lain sehingga diharapkan produktifitas pun dapat meningkat, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dapat dikatakan bahwa secara garis besar e-government mempunyai banyak keuntungan, seperti peningkatan kualitas pelayanan karena pelayanan publik dapat dilakukan selama 24 jam, berkat adanya teknologi internet. Hal ini juga banyak mengurangi penggunaan kertas (*paper work*) sehingga proses akan menjadi lebih efisien dan hemat. Selain itu semua proses dilakukan secara transparan karena proses berjalan secara online serta akurasi data lebih tinggi yang dapat mengurangi kesalahan identitas dan lain-lain. Salah satunya adalah melalui website.

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Pasal 53, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 27, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7A Tahun 2007 Pasal 4 dan Pasal 5. Terbaru, Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan

Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang penyediaan menu TPA (transparansi pengelolaan anggaran), yang mewajibkan pemerintah daerah (kabupaten maupun kotamadya) untuk mempublikasikan 12 dokumen terkait pengelolaan anggaran pada website resmi pemerintah daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong e-government tersebut (Agustin, 2014).

Media elektronik pada ketiga peraturan tersebut merujuk pada website milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat (Puspita dan Martani, 2012).

Penggunaan website merupakan langkah yang tepat dalam penerapan e-government sebab informasi yang terkandung didalamnya lebih mudah diakses bagi pengguna informasi. Penggunaan website di organisasi publik memegang peran penting dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dengan menyediakan pengungkapan yang lebih efektif dan efisien kepada warga dan organisasi mengenai proses, struktur, dan produk pemerintah, dan dengan menyediakan saluran untuk berinteraksi dengan pemerintah (Bimber, 1999; Jun and Weare, 2010; La Porte, Demchak, and Friis, 2001; Musso, Weare, and Hale, 2000; Tolbert and mossberger, 2006; West, 2004).

Teori yang memberikan penilaian standar kualitas pada bentuk situs website, adalah menurut Kominfo 2007, harus mempunyai isi minimal pada setiap websitelyaitu selayang pandang, pemerintah daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan atau kebijakan daerah, dan buku tamu dan berita. Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 mendefinisikan *e-government* atau website sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik harus meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam peraturan ini juga dijabarkan bahwa e-government diperlukan untuk mewujudkan *Good Public Governance*. Apabila semua kriteria terpenuhi, maka barulah website dapat dikatakan berkualitas.

Kenyataannya penerapan *good governance* dalam pengembangan *website* pada kota di Sumatera Barat belum optimal. Dilihat dari segi ketersediaan informasi maupun pelayanan yang diberikan pemda kepada pengguna masih ada yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan Kominfo tahun 2007. Seperti tidak updatenya berita, banyak halaman kosong, bahkan ada yang tidak dapat diakses. Bahkan riset Agustin (2014) menemukan bahwa kesungguhan pemerintah kabupaten maupun kotamadya di propinsi

Sumatera barat untuk memanfaatkan menu transparansi pengelolaan anggaran (TPA) untuk mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tidak lengkapnya dokumen yang disediakan, menu TPA yang sulit diakses, hingga rendahnya konsistensi pengungkapan setiap tahunnya

Hal ini jelas dilematis, mengingat anggaran pengembangan website yang telah diberikan oleh pemerintah pusat cukup besar.

Tabel 1

Anggaran Pengembangan Informasi, Komunikasi, Media Masa, dan e

-government Menurut APBD Kota Se- Sumbar

Nama Kota	Anggaran Pengembangan Media Masa
Kota Padang	Rp. 1.549.980.000 (hanya untuk e-gov)
Kota Solok	Rp. 1.831.286.000
Kota Sawahlunto	Tidak di publikasikan
Kota Padang Panjang	Rp. 3.832.685.000
Kota Bukittinggi	Rp. 3.142.016.100
Kota Pariaman	Rp. 2.520.642.700
Kota Pavakumbuh	Rp. 2.001.688.000 (hanya untuk e-gov)

Jika dilihat pada tabel 1, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak sebanding dengan kualitas website yang disajikan.

Penelitian sebelumnya (Dwi Martani, dkk 2013) melihat bagaimana kualitas website yang diukur dari penilaian transparansi dan akuntabilitas saja. Maka dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, terkait dengan website yang dimiliki pemda, penelitian ini tidak hanya menilai dari segi transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menilai dari segi fitur website, keefektivan website dan keefesiensian website. Selain itu penelitian ini akan menilai website pemda di mata pengguna serta membandingkannya dengan website pemda Kota Surabaya yang merupakan salah satu website pemda terbaik di Indonesia.

Dari permasalahan diatas maka peneliti mengangkat penelitian mengenai **“Analisis Kualitas website Pemerintah Daerah pada Seluruh Kota Sumatera Barat”**.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kualitas website pemerintah daerah dari segi penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang ada pada seluruh Kota Sumatera Barat ?

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika salah satu pihak yaitu (principal) memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada pihak lain (agent) untuk melakukan pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Implikasi teori ini menjelaskan bahwa pemda yang bertindak sebagai agen menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku prinsipal dengan menyediakan seluruh informasi dan layanan publik melalui website.

2. Teori Signaling

Teori signalling dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan pihak luar khususnya masyarakat. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik pada website yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan dan non keuangan yang positif dan dapat dipercaya melalui website.

3. Kualitas Website

Teori yang memberikan penilaian standar kualitas pada bentuk realisasi e-goverment, yaitu berupa situs website, adalah menurut Kominfo 2007, harus mempunyai isi minimal pada setiap websitesebagai berikut:

- a. Selayang Pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan pemerintah daerah bersangkutan (sejarah, moto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
- b. Pemerintah daerah, menjelaskan struktur organisasi yang ada di daerah bersangkutan.
- c. Geografi, menjelaskan antara lain tentang, topografi, demografi, cuaca, dan iklim, sosial, dan ekonomi.
- d. Peta wilayah dan sumber daya, menyajikan batas administrasi wilayah, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumber daya.

- e. Peraturan atau kebijakan daerah, menjelaskan Perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan.
- f. Buku tamu dan berita, tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan.

4. **Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip Good Governance. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Beberapa kriteria untuk membangun website yang transparan menurut Dwi Martani, dkk, (2013):

- a. Laporan Kegiatan Pemerintah
Berupa laporan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Laporan Kinerja Pemerintah
Berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD).
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Berupa Laporan Posisi Keuangan (LPK)/Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5. **Akuntabilitas**

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kriteria Akuntabilitas menurut Krina (2003) dan BPKP :

- a. Laporan APBD Pemda
- b. Laporan Dana Hibah dan Bansos
- c. Penyajian laporan keuangan tepat waktu
- d. Opini Audit dari BPK

6. **Efektivitas dan Efisiensi**

Mengukur efektivitas sebuah instansi guna menentukan kinerja suatu lembaga merupakan tujuan dari penelitian ini. Kualitas dari sebuah pelayanan akan memberikan dampak bagi tercapainya target pemerintah sehingga dapat dikatakan efektif atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kriteria penilaian efektifitas suatu websitemenurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 :

- a. Interactifity

Proses interaksi dua arah antara Pemerintah pengelola website dan masyarakat pengakses tersebut. Seperti pemerintah menyediakan fasilitas berupa, email, layanan telepon, dan alamat website.

- b. Sistem Navigasi

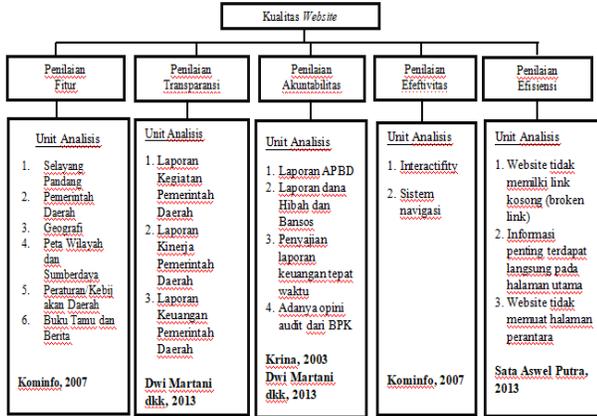
Merupakan petunjuk bagi pengunjung website berupa, fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat.

Menurut Sata Aswei Putra (2013) Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Untuk melakukan penilaian Efisiensi terhadap website Pemda memiliki beberapa :

- a. Website tidak memiliki halaman kosong.
- b. Informasi penting terdapat langsung pada halaman utama.
- c. Website tidak memuat halaman perantara.

Dari unsur-unsur di atas apabila Pemerintah dapat melakukan dan mewujudkan ke dalam sistem Pemerintahan e-government melalui situs website, maka terciptanya pelayanan website yang prima akan sangat mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

B. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Pengukuran yang digunakan dalam menilai kualitas website kab/kota Provinsi Sumatera Barat pada penelitian ini menggunakan metode skoring. Analisis skor menunjuk proses menilai alternatif kebijakan dengan menciptakan dan menggunakan indikator-indikator untuk menilai (memberi skor) alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan bila diperlukan memberikan pembobotan pada indikator yang dinilai lebih penting dari indikator lain (Dwiyanto, 2009). Tahap-tahap penelitian ini adalah:

- Melakukan skoring dari masing masing unit analisis pada website.
- Melakukan analisis skoring dari segi konten penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
- Interpretative dari segi user dan perbandingan website.

Tabel 2
Penilaian Fitur

No	Unit Analisis	Kategori
1	Selang Pandang	Sejarah Moto Daerah Lambang Daerah Lokasi Dalam Bentuk Peta Visi dan Misi
2	Pemerintah daerah	Legislatif Eksekutif
3	Geografi	Topografi Demografi Cuaca Iklim
4	Peta Wilayah/Sumber Daya	Batas Administrasi Wilayah Sumber daya/ Potensi Daerah
5	Peraturan/Kebijakan Daerah	Peraturan Daerah Peraturan Walikota
6	Buku tamu dan berita	Berita Layanan Masukan/Pengaduan Masyarakat

(Sumber: Kominfo, 2007)

Tabel diatas merupakan standarisasi unit analisis dalam menilai fitur website resmi seluruh kab/kota di Sumatera Barat dari

berbagai referensi yang akan di skoring oleh peneliti pada kertas kerja.

Tabel 3
Penilaian Transparansi

No	Unit Analisis	Kategori
1	Kegiatan Pemerintah	Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJM) Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
3	Laporan Keuangan Daerah	Neraca/Laporan Posisi Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

(Sumber: Dwi Martani dkk, 2013)

Pada tabel 3, penilaian yang dilakukan adalah melihat suatu website yang tranparansi. Suatu website dikatakan tranparansi apabila adanya keterbukaan akses masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan pemerintah yang disajikan dalam website. Kriteria yang ditetapkan dalam penilaian ini adalah adanya keterbukaan informasi mengenai kegiatan pemerintah, keterbukaan informasi mengenai laporan kinerja pemerintah daerah, dan keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4
Penilaian Akuntabilitas

No	Unit Analisis	Sumber
1	Menyajikan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Dwi Martani dkk, 2013
2	Menyajikan Laporan Dana Hibah dan Bansos	Krina, 2003
3	Penyajian Laporan Keuangan tepat waktu	Krina, 2003
4	Adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Krina, 2003

Pada tabel 4, penilaian yang dilakukan adalah untuk melihat akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah pada website pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam organisasi yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury 2003). Dalam melihat akuntabilitas pada website yaitu menyajikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), laporan Dana Hibah dan Bansos, penyajian laporan keuangan tepat waktu dan adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Tabel 5
Penilaian Efektivitas

No	Unit Analisis	Kategori
1.	Interactivity	Email Telepon Alamat website
2	Sistem Navigasi	Fitur Pencarian Akun Resmi Media Sosial Pemerintah Daerah Statistik Pengunjung

(Sumber: Kominfo, 2007)

Pada tabel 5, penilaian website pemda adalah diukur dari segi efektivitas. Efektifitas pada website yaitu apabila suatu website tersebut menunjukkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut ada dua indikator yang menjadi dasar dalam pembuatan website pemerintah daerah yaitu interactivity dan sistem navigasi yang nantinya dikelompokkan berdasarkan unit analisisnya.

Tabel 6
Penilaian Efisiensi

No	Unit Analisis
1	Website tidak memiliki halaman kosong
2	Informasi penting terdapat langsung pada halaman utama
3	Website tidak memuat halaman perantara

Pada tabel 6, penilaian yang dilakukan adalah mengetahui efisien suatu website pemerintah daerah. Suatu website dikatakan efisien apabila pemerintah dalam menjalankan e-government yaitu adanya penggunaan yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Indikator dalam menilai efisien suatu website adalah apabila website tidak memiliki link kosong (broken link), informasi penting terdapat langsung pada halaman utama, dan website tidak memuat halaman perantara.

Dalam melakukan perhitungan penilaian perbandingan, maka akan diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada analisis skoring. Jika data ada/tersedia, maka diberi skor 1, jika data tidak ada/ tidak tersedia, maka diberi skor 0.

Tabel 7
Tingkat Penilaian

Skor (%)	Penilaian Fitur	Penilaian Transparansi	Penilaian Akuntabilitas	Penilaian Efektif	Penilaian Efisien	Penilaian Keseluruhan
0-25	Tidak lengkap	Tidak transparansi	Tidak akuntabilitas	Tidak efektif	Tidak efisien	Tidak berkualitas
26-50	Kurang lengkap	Kurang transparansi	Kurang akuntabilitas	Kurang efektif	Kurang efisien	Kurang berkualitas
51-75	Cukup lengkap	Cukup transparansi	Cukup akuntabilitas	Cukup efektif	Cukup efisien	Cukup berkualitas
76-100	Lengkap	Transparansi	Akuntabilitas	Efektif	Efisien	Berkualitas

(Sumber: Dana Sulistiyo dkk, 2008)

Tabel diatas merupakan standarisasi unit analisis dalam menilai kualitas website pada website resmi kota yang ada di Sumatera Barat dari berbagai referensi yang akan di skoring oleh peneliti dalam kertas kerja. Dalam melakukan perhitungan penilaian perbandingan, maka akan diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada analisis skala penilaian sebagai berikut (Dana Sulistiyo dkk, 2008) :

Rumus perhitungan bobot skor yaitu sebagai berikut :

$$\text{Bobot skor} = \frac{\text{Jumlah hasil skoring website pemda}}{\text{Total skor}} \times 100\%$$

Setelah melakukan tahap skoring, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil analisis pada setiap website pemerintah daerah sesuai dengan unit analisis penelitian. Kemudian melihat manfaat website untuk pengguna dari fitur-fitur yang disajikan website pemda tertentu dan membandingkan website pemda kab/kota Sumatera Barat dengan website pemda terbaik di Indonesia. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang telah didapat untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Dari 19 website pemda kab/kota di Sumatera Barat, 16 website pemda kab/kota yang bisa diteliti. 3 website pemda kab/kota tidak dapat diteliti, yaitu website pemda Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh karena website tersebut tidak dapat diakses (*maintenance*). Dalam penelitian ini menggunakan lima penilaian kualitas website, yaitu Penilaian Fitur, Penilaian Transparansi, Penilaian Akuntabilitas, Penilaian Efektivitas, dan Penilaian Efisiensi. Berikut hasil penelitian kualitas website pemerintah daerah dari ke enam website pemerintah daerah kota di Sumatera Barat.

Tabel 8
Hasil Persentase Bobot Skor

No	Website Pemda	Fitur	Transparansi	Akuntabilitas	Efektifitas	Efisiensi	Bobot Skor Keseluruhan	Penilaian
1	Kota Padang	30%	2,5%	7,5%	15%	2,5%	60%	Cukup Berkualitas
2	Kota Solok	35%	2,5%	5%	15%	5%	65%	Cukup Berkualitas
3	Kota Sawahlunto	27,5%	0	0	12,5%	2,5%	45%	Kurang Berkualitas
4	Kota Padang Panjang	27,5%	12,5%	7,5%	7,5%	2,5%	57,5%	Cukup Berkualitas
5	Kota Bukittinggi	35%	7,5%	5%	10%	7,5%	65%	Cukup Berkualitas
6	Kota Pariaman	22,5%	7,5%	5%	12,5%	5%	52,5%	Cukup Berkualitas
7	Kota Payakumbuh							

Seluruh Kota di Sumatera Barat memiliki website resmi Pemerintah Daerah. Namun dari segi kemanfaatan maupun fungsi, beberapa website belum dapat ditelaah apakah website tersebut mempunyai data informasi yang terupdate, karena masih ada 0 pada beberapa kriteria penilaian. Dari tabel 13 di atas, seluruh website pemda yang diteliti rata-rata mendapatkan penilaian Cukup Lengkap.

Website Pemda Kota Bukittinggi dan Kota Solok memiliki persentase bobot skor tertinggi dengan nilai yang sama sebesar 65% (Cukup Lengkap). Terdapat 26 informasi yang disajikan Kota Bukittinggi dari total 40 item penilaian penelitian. Sedangkan Kota Sawahlunto memiliki persentase bobot skor terendah dengan nilai 45% (Kurang Lengkap), hanya mampu menyajikan 18 informasi dari total 40 item penilaian penelitian, dengan nilai 0 untuk penilaian transparansi dan penilaian akuntabilitas.

Informasi-informasi yang disajikan pada website pemda kota di Sumatera Barat masih banyak yang belum update. Akibat dari belum updatenya informasi tersebut adalah masyarakat pengguna akan beranggapan bahwa pemda kota tidak peduli dengan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Kemudian pengguna akan malas mengunjungi website pemda tersebut karena informasi terupdate tidak mereka temukan, dan statistik pengunjung pun akan menurun. Maka website tidak menjadi pilihan utama untuk mendapatkan informasi atau layanan publik.

Penyebab dari tidak updatenya website pemda ini mungkin karena pertama, sebagian besar pekerjaan di pemerintahan yang maksimal cuma dikerjakan selama 6 bulan karena berkaitan dengan tahun anggaran seperti APBD. Kedua, tidak ada SDM yang mampu atau berbakat dalam mengelolanya. Ketiga, pemerintah belum memiliki perencanaan strategis untuk pengembangan sebuah website sehingga terkesan instan.

Secara keseluruhan tingkat kesiapan pemda dalam mengimplementasikan good governance dalam website sesuai dengan inpres No 3 Tahun 2003 khusus untuk penyajian informasi keuangan dan laporan kinerja masih berada dalam tahap 1 yaitu persiapan berarti hanya menampilkan website yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini didukung dengan hasil pengamatan bahwa sebagian website pemda Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman terdapat menu khusus/link untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan dan laporan kinerja namun menu/link tersebut hanya menampilkan halaman kosong dan tidak sesuai dengan dokumen yang diinginkan. Selain itu pengguna saat mencari informasi pada website juga susah karena harus mencari pada kolom searching. Tidak semua

informasi langsung tersedia seperti fitur/subfitur pada website pemda tersebut.

Untuk berada pada tahap 2 yaitu interaksi berarti isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah. Namun masih banyak website Pemda di Sumatera Barat yang masih tidak bisa mendapatkan atau mendownload RPJP, LAKIP, bahkan laporan keuangan. Kemudian untuk berinteraksi dengan pemda kota pun susah, rata-rata seluruh website yang telah diemail untuk bertanya tidak dijawab. Para investor akan membatalkan investasinya apabila pemda kota tidak bersifat responsif terhadap pertanyaan ataupun keluhan yang mereka hadapi. Begitu juga dengan pengguna lainnya, mereka akan malas untuk mengakses website pemda kota yang tidak responsif tersebut.

Pada tahap 3 yaitu tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/ formulir untuk secara online mulai diterapkan, aplikasi pemerintahan yang biasanya bersifat konvensional dengan hardcopy mulai di konversi kedalam bentuk softcopy. Dari perubahan bentuk hardcopy ke dalam softcopy ini sudah mulai didapatkan manfaat dari ke-efisiensi biaya, misalkan biasanya selalu menggunakan kertas sekarang menjadi berupa file, sehingga mengurangi biaya pembelian kertas dan tinta (Dedi Rianto, 2007). Namun belum ada website pemda kota di Sumatera Barat yang berada pada tahap ini.\

Pada fase ke 4 semua aplikasi pemerintahan sudah berbasis web, untuk itu dibutuhkan konversi pemrograman yang bukan berbasis web kedalam bentuk web. Misalkan dalam aplikasi electronic procurement, manajemen dokumen berbasis web, formulir elektronik seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi. Tahap ini pun belum ada pemda kota di Sumatera Barat yang mengaplikasikannya. Padahal tujuan adanya website dibuat adalah agar komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung. Akan lebih baik apabila website yang dikelola oleh pemerintah mempunyai sistem pemrograman dan aplikasi database yang lebih terintegrasi.

Perbandingan dengan Website Pemda Kota Surabaya

Website pemerintah daerah kota di Sumatera Barat masih belum berkualitas baik, dapat dibandingkan dengan *website* pemerintah

daerah terbaik di Indonesia, yaitu *website* pemerintah daerah Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan sebuah kota yang sudah maju, begitu pun dengan *website* pemerintah daerahnya yang tidak kalah maju dari seluruh kategori penilaian kualitas *website*. *Website* pemda Kota Surabaya mendapatkan awards sebagai *website* pemda kota terbaik dinilai dari segi konten, navigasi, aksesibilitas, estetika, dan aktualitas. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik kepada walikota Surabaya (<http://beritasatu.com>). Selain itu *website* pemda Kota Surabaya sudah menyediakan segala informasi untuk perusahaan, seperti menerapkan sistem *Surabaya Single Window* (SSW), yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Dari segi tampilan awal saja *website* pemerintah daerah Kota Surabaya saja sudah menarik, membuat masyarakat pengguna pun tertarik untuk mengaksesnya.



Gambar 2

Tampilan Utama Website Kota Surabaya

Untuk informasi, website pemerintah daerah Kota Surabaya telah mengupdate seluruh kebutuhan informasi bagi masyarakat pengguna. Seluruh informasi yang dibutuhkan langsung ada pada website resmi pemerintah daerah Kota Surabaya ini <http://www.surabaya.go.id>, tanpa banyak halaman perantara lain yang membuatnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Tabel 9
Hasil Penilaian Fitur Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Kategori	Skor
1	Selayang Pandang	Sejarah	1
		Moto Daerah	1
		Lambang Daerah	1
		Lokasi Dalam Bentuk Peta	0
		Visi & Misi	1
2	Pemerintah daerah	Legislatif	1
		Eksekutif	1
3	Geografi	Topografi	1
		Demografi	1
		Cuaca	1
		Iklim	1
4	Peta Wilayah/Sumber Daya	Batas Administrasi Wilayah	1
		Sumber daya/ Potensi Daerah	1
5	Peraturan/Kebijakan Daerah	Peraturan Daerah	1
		Peraturan Pemerintah	1
6	Buku tamu dan berita	Berita	1
		Layanan Pengaduan Masyarakat	1
Total Skor			16
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan			40%
Persentase Per Penilaian Fitur			94,11%
Penilaian			Lengkap

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Penilaian fitur untuk website pemda Kota Surabaya dapat dilihat bahwa dari 17 unit analisis yang dinilai, pemda mampu menyajikan 16 unit analisis. Hanya 1 unit analisis lokasi dalam bentuk peta yang tidak tersaji pada website pemda Kota Surabaya. Berarti website pemda Kota Surabaya masih lebih lengkap penyajiannya dalam segi fitur di bandingkan dengan website pemda Kota Sumatera Barat.

Tabel 10
Hasil Penilaian Transparansi Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Kategori	Skor
1	Kegiatan Pemerintah	Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	1
		Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	1
2	Laporan Kinerja Pemerintah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	1
		Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1
		Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD)	1
3	Laporan Keuangan	LPK/Neraca	1
		Laporan Realisasi Anggaran	1
		Laporan Arus Kas	1
		Catatan Atas Laporan Keuangan	1
Total Skor			9
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan			22,5%
Persentase Per Penilaian Transparansi			100%
Penilaian			Sudah Transparan

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Website pemda Kota Surabaya mampu menyajikan seluruh unit analisis penilaian transparansi yang dinilai. Hal ini masih tertinggal jauh dengan keadaan website pemda Kota Sumatera Barat yang hanya mampu paling banyak 5 unit analisis yang disajikan. Website pemda Kota Surabaya dinilai bersifat transparan dengan persentase 100%.

Tabel 11
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Skor
1	Menyajikan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	1
2	Menyajikan Laporan Dana Hibah dan Bansos	1
3	Penyajian Laporan Keuangan Tepat Waktu	1
4	Adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	1
Total skor		4
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan		10%
Persentase Per Penilaian Akuntabilitas		100%
Penilaian		Sudah Akuntabel

Website pemda Kota Surabaya mampu menyajikan seluruh unit analisis penilaian akuntabilitas yang dinilai. Hal ini masih tertinggal dengan keadaan website pemda Kota Sumatera Barat yang masih belum satupun menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Website pemda Kota Surabaya dinilai bersifat akuntabel dengan persentase 100%.

Tabel 12
Hasil Penilaian Efektivitas Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Kategori	Skor
1	Interactivity	Email	1
		Telepon	1
		Alamat Website	0
2	Sistem Navigasi	Fitur Pencarian	
		Akun Resmi Media Sosial Pemerintah Daerah	1
		Satistik Pengunjung	1
		Vote Pendapat	0
Total skor			4
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan			10%
Persentase per penilaian efektivitas			57,14%
Penilaian			Cukup Efektif

Website pemda Kota Surabaya tidak menyajikan 2 unit analisis dari 7 unit analisis penilaian efektivitas. Website pemda Kota Padang dan Kota Solok masih lebih unggul karena mampu menyajikan 6 dari 7 unit analisis yang disajikan.

Tabel 13
Hasil Penilaian Efisiensi Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Skor
1	Website Tidak Memiliki halaman Kosong	0
2	Informasi Penting Terdapat Langsung Pada Layanan Utama	1
3	Website Tidak Memuat Halaman Perantara	1
Total skor		2
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan		5%
Persentase per penilaian efisiensi		66,6%
Penilaian		Cukup Efisien

Website pemda Kota Surabaya masih memiliki link kosong. Website pemda Kota Bukittinggi masih lebih unggul karena mampu menyajikan seluruh unit analisis dari penilaian efisiensi.

Apabila seluruh website pemda kota di

Sumatera Barat juga meningkatkan kualitas websitenya, maka website yang dibuat akan sesuai dengan harapan yaitu dapat menerapkan prinsip good governance agar mengecilkan tingkat korupsi yang ada pada tiap daerah, serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Seperti menampilkan informasi lowongan kerja terupdate agar mempermudah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan cukup mengakses website pemda tertentu dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka serta mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian menampilkan data dan lokasi hotel/penginapan untuk mempermudah pengunjung luar daerah yang dapat meningkatkan PAD.

Pemda juga bisa menampilkan data perpustakaan daerah dan daftar buku apa saja yang ada agar dapat mempermudah masyarakat untuk mencari referensi yang dibutuhkan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, pemda bisa menampilkan informasi rumah sakit dan beserta fasilitas kesehatannya, agar dapat mempermudah masyarakat untuk menentukan rumah sakit yang sesuai dan meningkatkan angka harapan hidup daerah. Dengan begitu website pemerintah daerah dapat secara cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penilaian kualitas website pemerintah daerah dari 6 kota di Sumatera Barat 5 diantaranya mendapatkan kategori penilaian Cukup Lengkap. Hanya Kota Sawahlunto yang mendapatkan kategori penilaian Kurang Lengkap. Rata-rata website pemerintah daerah kota di Sumatera Barat belum mampu menerapkan good governance dalam website pemerintah daerahnya, yaitu bersifat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Tujuan dari penerapan e-government dengan dibuatnya website sebagai sebuah pelayanan publik kepada pengguna belum semuanya terwujud dikarenakan masih banyak kriteria yang diberi skor 0. Ada atau tidaknya website pemda, tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Saran

1. Untuk menunjang kualitas website, pemerintah pusat harus melakukan evaluasi berkala dalam pengembangan website pemerintah daerah.
2. Dengan biaya besar yang dikeluarkan untuk pengembangan website seharusnya pemerintah pusat memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota yang berkaitan dengan website agar website dikelola dengan baik.

3. Pemerintah daerah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuntungan dari penggunaan website pemerintah daerah agar website pemerintah daerah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada *Website* Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- Afriyanti, Dwi. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Andriariza, Yan. 2014. Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen Analysis Of Application Of E-Government In The District. Jakarta Pusat:Vol 3 No 1.
- Annisa Ningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Diambil dari <http://ovy19.wordpress.com>. diakses (2 Februari 2018).
- Aprilia Nurina Shanty, Andy Fefta Wijaya, Suryadi. 2014. Efektivitas website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah. Malang : Vol 17 No 2.
- Arum Sari Kusuma Dewi, Wahyu Agus, Winamo. 2012. Implementasi E-government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. Jember : ISSN 1412-5366.
- Auditya, Lucy. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Bengkulu:Volume 3 Nomor 1.
- Cahyadi Arif. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Surabaya.
- Connely Brian, Trevis. 2011. Signaling Theory A Review and Assessment.
- Cordella, Antonio, Tempini, Niccolo. 2015. E-government and Organizingnal Change: reporting the role of ICT ang Bureaucrary in Public Service Delivery. Uk: Government Information Quartely.
- Dewi, DPKR. 2015. Agency Theory. Unud. Diambil dari <http://eropo.unud.ac.id>. Diakses tanggal (5 Januari 2018).
- Dwi Martani, Debby Fitriarsi, Annisa. 2013. Transparansi Keuangan Dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Bandung.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Transparansi Pelayanan Publik. Yogyakarta.
- Efferin, Sujoko. 2012. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta.
- Fadzil, Nyoto. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Daerah. Jakarta
- Hakiki, Erisva. 2017. E-goverment dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. Riau.
- Hardono, Wisnu. 2015. Analisis Kualitas dan efektifitas E-Government Sebagai Media Pelayanan Publik Di Pemerintahan Dearha Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Haryanto. 2008. Agency Theory. Diambil dari : <http://e-journal.uajy.ac.id> (5 Januari 2018)
- Heryana, Toni. 2013. Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan. Cianjur.
- Indiahono, Dwiyanto 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta.
- Irawan, Bambang. 2013. Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Samarinda.
- Jarot, Dimas Bayu. Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal. Diambil dari : <http://nasional.kompas.com> (25 Januari 2018)
- Jauhari Arif, Hasan Basri, Shabri. 2015. Penerapan Good Governance Berbasis E-Government dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Banda Aceh:ISSN 2302-0164.
- Khudri, Yusuf dkk. 2013. Analisis Kualitas Desain dan Kunjungan Situs Pemerintah Derah Di Indonesia. Bandung
- Krishna Putu Yogiswara, Piers Andreas Noak, Ketut Winaya. 2015. Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik. Klungkung.
- Kurniawan, Agung. 2017. Akuntabilitas dan Trasnparansi dalam Pelayanan Publik. Diambil dari : <http://dokupdf.com> (4 Januari 2018).

- Martha. 2014. Transparansi dan Akuntabilitas. Diambil Dari: <https://repository.widyatama.ac.id>. (5 Januari 2018).
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik: Jakarta.
- Maisyah, Putra. 2017. PANRB Mentargetkan Tahun 2017 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bisa Diwujudkan. Diambil dari : <http://news.liputan6.com>. (25 Januari 2018).
- Muttaqin, Z. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai di Sektor Pendidikan. Lampung.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2017.
- Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000.
- Panopoulou Eleni, Efthimios Tambouris, Konstantinos Tarabani. 2008. A Framework For Evaluating Web Sites Of Public Authorities. Yunani.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak. Semarang.
- Republik Indonesia (2003). Instruksi Presiden. Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Ridwan, Moehamad. 2014. Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jakarta.
- Sitokdana. 2015. Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Yogyakarta
- Sjahrudin. 2011. Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Padang.
- Sulistiyo Dana, Herlan Puspa Negara, Yanuar Firdaus. 2008. Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs web Pemerintah Derah Kabupaten/Kota. Yogyakarta
- Swamandiri. 2012. Agency Theori. Diambil Dari: E-journal.uajy.ac.id. (5 Januari 2018).
- Undang Undang No 14 2008. Keterbukaan Informasi Publik.
- Wau, Ikhlas. 2015. Teori Signalling Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. Semarang.
- Widjajanto Budi, Yuliman Purwanto, Nova Rijati. 2015. Analisis Layanan Informasi Publik Pada Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jawa tengah.
- Wirartha. 2016. Metodologi Penelitisan Sosial Ekonomi. Yogyakarta.
- Wiratmo Liliek Budiastuti, Noor Irfan, Kuwatono. 2017. Website Pemerintah Sebagai Sarana Online Public Relations. Semarang: Aspikom
- Yohana Nova Tantri Puspita Yazid, Welly Wirman. 2013. Pengelolaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyampaikan Informasi Bagi Masyarakat. Riau.
- Yoserizal, Wahyu Eko Yudiatmaja. 2010. Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Padang.
- Yuhefizar. 2010. Tinjauan Penerapan e-Government di Provinsi Sumatera Barat. Padang

